

ANALISIS DAYA DUKUNG WILAYAH TERHADAP INDUSTRI HILIR KELAPA SAWIT DI RIAU¹

*Analysis Of Regional Support Capacity
Toward Oil Palm Downstream Industry In Riau Province*

Riadi Armas² dan Almasdi Syahza³

Pusat Pengkajian Koperasi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Universitas Riau

E-mail: asyahza@yahoo.co.id atau syahza@telkom.net

Website: <http://almasdi.unri.ac.id>

ABSTRAK

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang penting dan strategis di daerah Riau karena peranannya yang cukup besar dalam mendorong perekonomian rakyat, terutama bagi petani di pedesaan. Tahun 2003 luas perkebunan kelapa sawit telah mencapai 1.312.661 ha. Dari sisi lain untuk pengolahan tandan buah segar (TBS) harus didukung oleh pabrik kelapa sawit (PKS). Namun kenyataannya pabrik kelapa sawit yang ada tidak mencukupi menampung TBS dari kebun petani baik plasma maupun petani swadaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya dukung wilayah (DDW) terhadap pembangunan industri hilir kelapa sawit. Dari perhitungan diperoleh angka indeks daya dukung wilayah (DDW) sebesar 2,241. Hasil perhitungan ini membuktikan bahwa angka DDW lebih besar dari 1, yang berarti daya dukung wilayah Riau terhadap penyediaan bahan baku industri hilir sangat besar.

Kata kunci: daya dukung wilayah, industri hilir

Abstract

Oil palm is an important and strategic commodity in Riau Province as its contribution is potential enough in backing up the society economic matters, specially for the farmer in the rural areas. In 2003, the oil palm plantation has reached 1,312,661 ha. From the other sides, fresh stem fruit (TBS) processing should be supported by oil palm factory (PKS). In fact, regional support capacity (DDW) the oil palm factories available aren't enough to absorb the fresh stem fruit from the plantation either plasma or self-support farmer. This research wants to know regional support capacity (DDW) toward oil palm downstream industry. The calculation shows that the regional support capacity (DDW) the indeks number is 2.241. This calculation proves that DDW is bigger than 1, means that the regional support capacity of Riau toward basic commodity supply of downstream industry is very powerful.

Key Words: Regional Support Capacity, Downstream Industry

¹ Telah dipublikasikan dalam *Jurnal Ekonomi*, Th.X/01/Maret/2005, PPD&I Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta.

² Pengajar pada Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Riau.

³ Pengajar pada Program Studi Pendidikan Ekonomi dan Agribisnis Universitas Riau.

Pendahuluan

Perkembangan sektor pertanian di daerah Riau sampai saat ini cukup menggemblirakan, namun tingkat pendapatan masyarakat dari usaha pertanian belum meningkat seperti yang diharapkan. Karena itu Pemerintah Daerah Riau mencanangkan sasaran pembangunan Daerah Riau harus mengacu kepada Lima Pilar Utama, yaitu: 1) pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan; 2) pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia; 3) pembangunan kesehatan/olahraga; 4) pembangunan/kegiatan seni budaya; dan 5) pembangunan dalam rangka meningkatkan iman dan taqwa. Pembangunan ekonomi kerakyatan difokuskan kepada pemberdayaan petani terutama di pedesaan, nelayan, perajin, dan pengusaha industri kecil (Pemda Propinsi Riau, 2000).

Setiap pembangunan yang dilaksanakan harus mengacu kepada lima pilar utama pembangunan daerah Riau. Karena pembangunan daerah sangat ditentukan oleh potensi yang dimiliki oleh suatu daerah, maka kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah daerah harus mengacu kepada potensi daerah yang berpeluang untuk dikembangkan, khususnya sektor pertanian. Pengembangan sektor pertanian dalam arti luas diarahkan kepada sistem agribisnis dan agroindustri, karena pendekatan ini akan dapat meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, yang pada hakekatnya dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku-pelaku agribisnis dan agroindustri di daerah.

Untuk pembangunan ekonomi pedesaan pemerintah daerah telah mengembangkan sektor pertanian khususnya sub sektor perkebunan. Arah kebijaksanaan sektor perkebunan ini adalah melaksanakan perluasan areal perkebunan dengan memberikan kesempatan kepada perkebunan swasta.

Sub sektor ini dapat menyerap tenaga kerja, menunjang program permukiman dan mobilitas penduduk serta meningkatkan produksi dalam negeri maupun ekspor nonmigas. Untuk sektor perkebunan Pemerintah Daerah Riau menetapkan kelapa sawit sebagai komoditas unggulan daerah.

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang penting dan strategis di daerah Riau karena peranannya yang cukup besar dalam mendorong perekonomian rakyat, terutama bagi petani perkebunan. Hal ini cukup beralasan karena daerah Riau memang cocok dan potensial untuk pembangunan pertanian perkebunan. Dengan luas mencapai 1.312.661 ha pada akhir tahun 2002, maka pada saat ini daerah Riau mempunyai kebun kelapa sawit terluas di Indonesia. Untuk masa-masa akan datang luas areal kelapa sawit akan terus berkembang, karena tingginya animo masyarakat terhadap perkebunan kelapa sawit. Perkembangan luas areal perkebunan tersebut tentu akan diikuti oleh peningkatan produksi tandan buah segar (TBS).

Dari sisi lain untuk pengolahan TBS harus didukung oleh pabrik kelapa sawit (PKS). Namun kenyataannya pabrik kelapa sawit yang ada tidak mencukupi menampung TBS dari kebun petani baik plasma maupun petani swadaya, ini mengakibatkan meningkatnya suplai dari TBS terutama sekali dari perkebunan rakyat (swadaya). Penyebab lain meningkatnya suplai TBS adalah sebagian besar produktivitas perkebunan mulai meningkat (Syahza. A, 2003b). Kelebihan TBS di daerah Riau menunjukkan kemampuan daya dukung wilayah sebagai pemasok bahan baku untuk industri kelapa sawit.

Daya dukung wilayah adalah kemampuan wilayah dalam menyediakan bahan baku industri yang ada di kawasan wilayah itu sendiri. Konsep daya dukung wilayah paling mudah diterapkan pada sistem agraris. Dalam sistem itu

industri yang berbasis agraris kesinambungan kegiatannya tertumpu pada pertanian dalam arti luas. Menurut Sostroamidjojo dan Entang (1975) pengukuran daya dukung wilayah didasarkan pada kemampuan lahan (*land capability*). Pada umumnya kemampuan lahan dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan lahan dalam fungsinya sebagai media tumbuh untuk mencapai tingkat produksi tertentu. Dalam keadaan ini yang ditinjau adalah daya dukung wilayah terhadap pengembangan industri hilir yang berbasis kelapa sawit.

Berdasarkan pengertian dari *land capability* akan dapat diketahui kemampuan lahan di daerah Riau untuk memproduksi TBS. Kemampuan tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan bahan baku per tahun, luas perkebunan kelapa sawit, dan produktivitas lahan tersebut.

Pada dasarnya daya dukung itu tergantung pada kemampuan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan perkebunan guna mendukung berkembangnya industri yang berbasis kelapa sawit. Makin besar persentasi lahan yang dipakai untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit makin besar daya dukung wilayah. Karena semakin luas areal perkebunan akan semakin besar produksinya. Tentu saja akan menghasilkan bahan baku yang diperlukan untuk industri pengolahan kelapa sawit. Persentasi lahan ditentukan oleh kesesuaian tanah untuk perkebunan kelapa sawit.

Pengembangan industri kelapa sawit (pabrik kelapa sawit) di daerah Riau erat kaitannya dengan daya dukung wilayah, terutama dalam penyediaan bahan baku untuk industri itu sendiri, terutama tandan buah segar (TBS). Tanpa tersedianya bahan baku yang cukup proses produksi akan terhalang dan kontinuitas produk selanjutnya akan terganggu. Untuk pengembangan industri hilir kelapa sawit perlu dilakukan suatu analisis tentang daya dukung wilayah

guna menunjang pengembangan industri hilir berbasis kelapa sawit di daerah Riau.

Lebih lanjut diungkapkan oleh Arifin. B (2001), produk minyak kelapa sawit mempunyai sifat keterkaitan industri ke depan maupun ke belakang yang cukup tinggi. Industri hilir minyak kelapa sawit yang sangat strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak adalah industri minyak goreng, sehingga pemerintah menaruh perhatian yang tinggi terhadap struktur pasar domestik minyak goreng. Tetapi serangkaian kebijakan pemerintah tersebut masih terlalu memfokuskan pada CPO dan melupakan seperangkat permasalahan pada struktur industri minyak goreng.

Dari apa yang diuraikan di atas, maka yang menjadi masalah pokok pada tulisan ini adalah: Apakah daya dukung wilayah berpotensi untuk pengembangan industri hilir berbasis kelapa sawit di daerah Riau ? Tujuan melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui daya dukung wilayah terhadap prospek pengembangan industri hilir kelapa sawit di daerah Riau.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat merumuskan kegiatan-kegiatan atau strategi apa yang mesti ditempuh oleh pemerintah daerah untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit ke depan dan strategi untuk pembangunan ekonomi pedesaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Pekanbaru dengan menggunakan data sekunder. Data diperoleh dari Dinas Perkebunan dan Dinas Perindustrian Propinsi Riau mencakup: jumlah petani kelapa sawit, luas lahan perkebunan (baik perkebunan besar swasta/BUMN maupun rakyat), produksi kelapa sawit,

produktivitas perkebunan kelapa sawit, jumlah dan kapasitas pabrik kelapa sawit (PKS) terpasang, dan kebutuhan bahan baku.

Analisis daya dukung wilayah dilakukan untuk mengetahui kemampuan wilayah daerah Riau dalam menyediakan bahan baku untuk industri kelapa sawit yaitu berupa tandan buah segas (TBS). Untuk mengetahui daya dukung wilayah tersebut digunakan data produksi kelapa sawit dan jumlah kebutuhan bahan baku untuk industri hilir kelapa sawit (PKS). Secara matematis daya dukung wilayah terhadap industri kelapa sawit adalah (Syahza. A, 2004):

$$DDW = \frac{L_i \times P_i}{KBB}$$

DDW merupakan daya dukung wilayah dalam pengembangan industri hilir kelapa sawit, L_i adalah luas perkebunan kelapa sawit di daerah Riau, P_i adalah produktivitas perkebunan kelapa sawit per hektar, dan KBB merupakan kebutuhan bahan baku industri hilir kelapa sawit dalam bentuk tandan buah segar.

Apabila hasil perhitungan menunjukkan rasionya > 1 , maka daya dukung wilayah dalam pengembangan industri hilir kelapa sawit cukup kuat, dan sebaliknya apabila rasionya < 1 , daya dukung wilayah sangat lemah untuk pengembangan industri hilir kelapa sawit.

Kebutuhan kapasitas PKS untuk mengolah TBS dapat dihitung dengan rumus (Syahza. A, 2002):

$$TKP = \frac{TM \times Pr}{JK \times JH \times 12}$$

Keterangan: TKP adalah total kapasitas pabrik; TM adalah luas tanaman menghasilkan; Pr adalah produktivitas lahan per tahun; JK adalah jam kerja pabrik per hari; dan JH adalah jumlah hari kerja pabrik per bulan.

Hasil dan Pembahasan

Daya Dukung Wilayah

Sampai akhir tahun 2002 produksi kebun kelapa sawit berupa tandan buah segar (TBS) dari daerah Riau telah mencapai 3.038.255 ton per bulan atau 36.459.061 ton per tahun dengan produktivitas 3,395 ton per hektar. Sementara itu jumlah pabrik kelapa sawit di Riau sebanyak 75 buah dengan kapasitas produksi sebesar 3.390 ton per jam (Dinas Perkebunan Riau, 2003).

Ada beberapa alasan kenapa Pemerintah Daerah Riau mengutamakan kelapa sawit sebagai komoditas utama, antara lain: *Pertama*, dari segi fisik dan lingkungan, daerah Riau memungkinkan bagi pengembangan perkebunan kelapa sawit. Kondisi daerah Riau yang relatif datar memudahkan dalam pengelolaan dan dapat menekan biaya produksi; *Kedua*, kondisi tanah yang memungkinkan untuk ditanami kelapa sawit menghasilkan produksi lebih tinggi dibandingkan daerah lain; *Ketiga*, dari segi pemasaran hasil produksi Daerah Riau mempunyai keuntungan, karena letaknya yang strategis dengan pasar internasional yaitu Singapura; *Keempat*, Daerah Riau merupakan daerah pengembangan Indonesia Bagian Barat dengan dibukanya kerjasama *Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle* (IMS-GT) dan *Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle* (IMT-GT), berarti terbuka peluang pasar yang lebih menguntungkan; dan *kelima*, berdasarkan hasil yang telah dicapai menunjukkan bahwa kelapa sawit memberikan pendapatan yang lebih tinggi

kepada petani dibandingkan dengan jenis tanaman perkebunan lainnya (Syahza. A, 2003a).

Karena alasan di atas maka kelapa sawit di daerah Riau merupakan tanaman primadona yang mendorong masyarakat mulai dari masyarakat kalangan bawah sampai masyarakat kalangan atas tertarik untuk menanam kelapa sawit secara swadaya. Akibatnya perkebunan kelapa sawit berkembang begitu cepatnya di daerah Riau. Ini disebabkan saat krisis ekonomi dimulai pada pertengahan tahun 1997, sektor perkebunan merupakan penyelamat bagi petani perkebunan khususnya petani kelapa sawit. Harga tandan buah segar (TBS) ini merangsang perusahaan perkebunan maupun petani swadaya untuk melakukan pengembangan perkebunan kelapa sawit. Sebagai bahan perbandingan perkembangan luas areal komoditi unggulan perkebunan di Daerah Riau disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Perkembangan Luas Areal Komoditi Utama Perkebunan di Propinsi Riau Tahun 1996 – 2002 (dalam Ha)

Tahun	Kelapa Sawit	Kelapa	Karet
1996	556.065	549.885	492.887
1997	670.148	576.779	508.297
1998	901.276	579.701	520.098
1999	1.002.401	639.877	566.549
2000	1.022.318	639.877	547.453
2001	1.119.798	639.877	566.130
2002	1.312.661	582.123	547.123
Pertumbuhan (%)	15,39	0,98	1,76

Sumber: Dinas Perkebunan Propinsi Riau, 2003

Luas kebun kelapa sawit di masa datang diprediksi akan selalu bertambah, karena tingginya animo masyarakat terhadap pengusahaan kelapa sawit. Seiring dengan pertambahan luas areal akan diikuti dengan peningkatan produksi TBS. Kondisi ini juga akan menyebabkan kapasitas pengolahan TBS

semakin dibutuhkan baik dari segi jumlah maupun dari segi kapasitas olahannya. Begitu juga untuk luas yang ada, produksinya akan bertambah karena masih banyaknya tanaman yang belum menghasilkan. Sampai tahun 2003 luas tanaman yang belum menghasilkan sebanyak 415.699 ha yang tersebar di duabelas kabupaten.

Guna mengetahui potensi PKS di daerah Riau, maka dilakukan analisis daya dukung wilayah (DDW) dalam penyediaan bahan baku PKS. Hasil perhitungan perkembangan DDW disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Luas Areal, Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, Kapasitas Olah PKS dan Analisis DDW PKS di Riau Tahun 2003

Kabupaten	Luas Tanaman		Produktivitas (ton/ha)	Kapasitas PKS (ton/jam)	DDW *
	TBM	TM			
Kampar	42.282	70.484	2,968	945	1,339
Rokan Hulu	99.341	195.186	2,052	385	2,601
Pelalawan	29.625	132.875	3,550	385	3,063
Bengkalis	18.060	65.084	2,284	-	-
Rokan Hilir	36.745	85.223	3,846	505	1,623
Siak	41.137	90.031	4,525	450	2,263
Dumai	7.717	7.863	0,638	-	-
Indragiri Hilir	36.715	25.872	3,059	120	1,649
Indragiri Hulu	28.037	68.926	3,984	255	2,692
Kuantan Singingi	74.758	49.142	1,220	345	0,434
Kepulauan Riau	1.282	3.603	3,379	-	-
Natuna	-	700	0,850	-	-
Total	415.699	894.989	3,395	3.390	2,241
DDW untuk tanaman menghasilkan					2,241
DDW untuk tanaman menghasilkan dan belum menghasilkan					3,281

Keterangan: * Hasil Perhitungan

Sumber: Dinas Perkebunan Propinsi Riau, Tahun 2003

Dari hasil perhitungan DDW yang disajikan pada Tabel 2 diperlihatkan dua model perhitungan, yakni perhitungan dengan hanya memperhatikan tanaman menghasilkan dan perhitungan dengan memasukkan tanaman belum menghasilkan. Dari perhitungan pertama diperoleh angka indeks DDW sebesar

2,241. Hasil perhitungan ini membuktikan bahwa angka DDW lebih besar dari 1, yang berarti daya dukung wilayah Riau terhadap penyediaan bahan baku PKS sangat besar. Setiap satu satuan kemampuan olah PKS didukung oleh bahan baku TBS sebanyak 2,241 satuan. Untuk masa yang akan datang produksi TBS mengalami peningkatan karena masih ada kebun yang belum menghasilkan. Jika diasumsikan semua kebun baik tanaman belum menghasilkan (TBM) dan tanaman menghasilkan (TM) berproduksi, maka DDW meningkat menjadi 3,281.

Tingginya angka DDW ini juga memperlihatkan melimpahnya bahan baku yang tersedia di wilayah tersebut. Kelebihan bahan baku ini akan menyebabkan tidak efisiennya proses produksi. Dari sisi lain kelebihan bahan baku yang dipasok dari pihak petani akan menyebabkan penurunan harga jual oleh petani itu sendiri. Karena kondisi pasar yang dihadapi oleh pihak petani adalah monopsonistik, maka petani tidak memiliki kekuatan tawar menawar, sehingga petani hanya sebagai penerima harga dari pihak pedagang (kaki tangan PKS). Kondisi ini juga menyebabkan harga TBS ditingkat petani sangat berfluktuasi, terutama bagi petani swadaya murni.

Dari sisi lain Djojodipuro (1992) menyatakan bahwa daya dukung wilayah untuk pembangunan industri dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: *factor endowment*, pasar dan harga, bahan baku dan energi, aglomerasi (keterkaitan antar industri dan penghematan ekstern), kebijaksanaan pemerintah, dan biaya angkutan.

Factor endowment adalah tersedianya faktor produksi secara kualitatif maupun kuantitatif di suatu daerah, antara lain: tanah, tenaga dan modal. Makin banyak *factor endowment* yang dimiliki oleh suatu daerah makin tinggi daya

dukung wilayah tersebut terhadap pengembangan industri. Setiap daerah memiliki faktor endowment yang berbeda. Sebagai contoh untuk tanaman kelapa sawit, daerah Riau mempunyai keunggulan dari segi tanah, yaitu kondisi tanah yang mendukung untuk media tumbuh kelapa sawit, daerah yang relatif rata sehingga dapat menekan biaya produksi kelapa sawit. Di samping itu juga rendahnya biaya tenaga kerja yang bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit.

Luas lahan perkebunan kelapa sawit cenderung meningkat terutama perkebunan rakyat dengan skala kecil. Hal ini akan berdampak negatif terhadap harga TBS. Untuk menanggulangi ini maka di setiap sentra produksi TBS harus didirikan pabrik kelapa sawit. Dari data yang ada kapasitas PKS terpasang baru sebesar 3.390 ton per jam. Pada Tabel 3 disajikan proyeksi kebutuhan PKS di masa datang dengan asumsi luas lahan berpedoman kepada tahun 2002.

Tabel 3 Proyeksi Kebutuhan PKS untuk Riau

Uraian	Perkiraan
Luas Lahan yang ada (ha)	1.312.661
Perkiraan Produksi TBS (ton/tahun)	28.546.785
PKS dibutuhkan (ton TBS/jam)	5.947
Kapasitas PKS terpasang (ton TBS/jam)	3.390
Kekurangan PKS (ton TBS/jam)	2.557
Jumlah PKS yang diperlukan (45 ton TBS/jam)	57

Apabila diasumsikan jam kerja pabrik per hari 16 jam dan dalam satu bulan pabrik bekerja selama 25 hari, dan produksi TBS diproyeksikan 21,78 ton per tahun, maka kapasitas PKS yang dibutuhkan sebesar 5.947 ton per jam. Jika dibandingkan dengan kapasitas olah pabrik kelapa sawit (PKS) sekarang yakni 3.390 ton per jam dengan kemampuan produksi yang ada tidaklah

seimbang. Kekurangan kapasitas PKS sebesar 2.557 ton per jam atau setara dengan 57 buah PKS dengan kapasitas 45 ton per jam.

Prospek pembangunan agroindustri kelapa sawit di daerah Riau sangat cerah. Hal ini juga diungkapkan oleh Suhartiningsih. W (2003), dengan potensi yang ada Indonesia mampu mengalahkan Malaysia dalam memproduksi minyak kelapa sawit. Selama ini Malaysia merupakan eksportir terbesar di dunia yang pangsa pasarnya mencapai 48,26 %. Untuk itu diperlukan beberapa langkah, antara lain: *Pertama*, memperluas areal perkebunan; *Kedua*, membangun infrastruktur yang memadai dan harus terkait dengan unit pengolahannya; *Ketiga*, mengembangkan kegiatan penelitian dan pengembangan yang selama ini kurang terfokus; *Keempat*, menemukan teknologi baru untuk diversifikasi produk; dan *kelima*, harus ada deregulasi dalam industri kelapa sawit. Selama ini proses perizinan investasi industri kelapa sawit di Indonesia harus melewati 17 lembaga di pusat dan 25 lembaga di daerah. Sementara di Malaysia, investor cuma bertemu dengan *Malaysian Palm Oil Board* (MPOB).

Potensi Pembangunan Industri

Pembangunan ekonomi daerah juga didukung oleh teori lokasi. Teori ini juga sering digunakan untuk penentuan dan pengembangan kawasan industri di suatu daerah. Pemikiran teori ini didasarkan pada sifat rasional pengusaha yang cenderung mencari keuntungan setinggi mungkin dengan biaya serendah mungkin. Karena itu pengusaha akan memilih lokasi usaha yang memaksimalkan keuntungan dan meminimalisasikan biaya produksinya, yakni lokasi yang dekat dengan bahan baku dan pasar (Tambunan, 2001). Di

samping itu juga banyak faktor lain yang juga harus dipertimbangkan seorang pengusaha untuk memilih lokasi, seperti ketersediaan tenaga kerja, tingkat upah, biaya energi, ketersediaan pemasok bahan baku, komunikasi, infrastruktur, termasuk alat transportasi, sanitasi, fasilitas-fasilitas pendidikan dan pelatihan, dan kualitas pemerintah. Untuk pengembangan suatu lokasi industri di suatu daerah, apakah mampu setiap daerah menciptakan faktor-faktor lokasi insentif yang dapat menarik perusahaan-perusahaan dari luar daerah. Kalau pemerintah daerah mampu melakukan ini, maka akan terjadi *spread effect* di daerah tersebut.

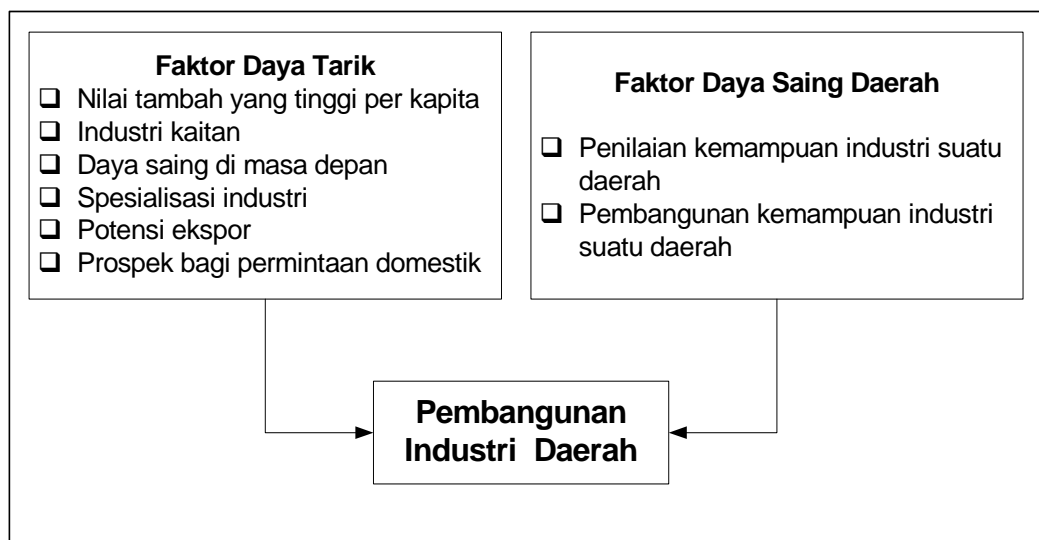
Dalam upaya pembangunan ekonomi di daerah Riau, maka industri yang diunggulkan adalah industri pengolahan hasil perkebunan (kelapa sawit). Pembangunan ini membutuhkan dana yang tidak sedikit, pemerintah daerah berusaha menarik investor dari luar, apakah dalam bentuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) atau dalam bentuk penanaman modal asing (PMA).

Dalam kerangka pemikiran Kotler (1997), ada sejumlah faktor penentu pembangunan industri di suatu daerah, yaitu faktor daya tarik industri dan faktor daya saing daerah. Kerangka pemikiran Kotler tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.

Dari gambar tersebut dapat diuraikan faktor daya tarik industri di suatu daerah, yaitu:

- 1) Nilai tambah per kapita yang tinggi. Ini berarti industri tersebut memiliki sumbangan yang penting tidak hanya terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga terhadap pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB).

- 2) Industri-industri kaitan. Perkembangan industri tersebut akan meningkatkan total nilai tambah daerah atau mengurangi kebocoran ekonomi dan ketergantungan impor.
- 3) Daya saing di masa depan. Ini sangat menentukan prospek dari pengembangan industri yang bersangkutan.
- 4) Spesialisasi industri. Berdasarkan pemikiran teori perdagangan internasional klasik, suatu daerah sebaiknya berspesialisasi pada industri-industri dimana daerah tersebut memiliki keunggulan komparatif sehingga daerah tersebut akan menikmati *gain from trade*.
- 5) Potensi ekspor. Apabila suatu daerah memiliki *gain from trade*, maka daerah tersebut dapat mengekspor barangnya dengan biaya yang lebih rendah, karena adanya spesialisasi produk dari daerah tersebut.
- 6) Prospek bagi permintaan domestik. Ini akan memberikan suatu kontribusi yang berarti bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui konsumsi lokal.



Sumber: Kotler (1997)

Gambar 1. Faktor Penentu dalam Pembangunan Industri Suatu Daerah

Menurut Kotler (1997), faktor penyumbang daya tarik industri di suatu daerah dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu:

- 1) Faktor pasar. Termasuk faktor ini adalah ukuran pasar, ukuran segmen kunci, laju pertumbuhan pasar, keragaman pasar, kepekaan terhadap harga dan faktor eksternal, siklus dan musim, serta kemampuan tawar menawar.
- 2) Faktor persaingan. Antara lain tingkat pemusatan, substitusi disebabkan oleh progres teknologi, tingkat dan jenis integrasi, dan *entry rate* dan *exit rate*.
- 3) Faktor keuangan dan ekonomi. Faktor ini adalah nilai tambah, kesempatan kerja, keamanan, stabilitas ekonomi, pemanfaatan kapasitas produksi, skala ekonomis, dan ketersediaan infrastruktur keuangan.
- 4) Faktor teknologi. Berkaitan dengan teknologi adalah kompleksitas, diferensiasi, paten dan hak cipta, teknologi proses manufaktur yang diperlukan.

Struktur ekonomi yang seimbang antara sektor pertanian dan sektor industri dapat diwujudkan dengan cara melaksanakan pembangunan yang seimbang antara sektor pertanian dan sektor industri, sehingga tidak terjadi hambatan dari sisi penawaran dan permintaan. Pada dasarnya alasan yang menimbulkan perlunya pembangunan yang seimbang adalah untuk menjaga agar pembangunan tersebut tidak menghadapi hambatan dalam memperoleh bahan baku, tenaga ahli, listrik, dan fasilitas untuk mengangkut hasil-hasil produksi ke pasar. Demikian juga untuk memperoleh pasar dari barang-barang yang diproduksi.

Jika diperhatikan strategi pembangunan di Indonesia sampai saat ini dilakukan pembangunan yang berimbang antara sektor pertanian dengan sektor industri. Pelaksanaan pembangunan yang berimbang ini dapat dilihat dari peranan kedua sektor tersebut terhadap produk domestik bruto (PDB). Pada masa lalu peranan sektor pertanian terhadap PDB jauh lebih besar dibandingkan dengan sektor industri.

Sebenarnya strategi pembangunan seimbang itu bertujuan untuk keselarasan dalam perekonomian agar antar sektor mampu saling menunjang dan melengkapi satu sama lain. Hal ini dapat dilihat dari program pembangunan pertanian di subsektor perkebunan. Dalam hal ini pembangunan perkebunan kelapa sawit harus ditunjang oleh industri hulunya, antara lain: penyediaan bibit yang baik, sarana produksi yang memadai, alat-alat pertanian yang mendukung. Begitu juga untuk ke depan pembangunan perkebunan kelapa sawit juga dapat merangsang tumbuhnya industri hilir, seperti: pabrik kelapa sawit (PKS) yang menghasilkan minyak sawit, dan industri hilir lainnya yang berbahan baku dari minyak sawit, seperti: industri minyak goreng, deterjen, kosmetik, dan industri kimia lainnya.

Menurut Mellor (1976), pembangunan di sektor industri dan sektor pertanian saling berkaitan dan saling melengkapi satu sama lain. Sektor pertanian memproduksi berbagai produk konsumsi dan bahan baku sektor industri (agroindustri), sedangkan sektor industri memproduksi berbagai kebutuhan untuk sektor pertanian.

Selanjutnya studi yang dilakukan oleh Mellor (1984), telah menunjukkan adanya hubungan antara satu sektor dengan sektor lainnya dan hubungan tersebut meningkat sejalan dengan tumbuhnya perekonomian. Stagnasi yang

terjadi pada sektor pertanian akan dapat menghambat pertumbuhan sektor industri, khususnya agroindustri karena terlambatnya aliran bahan baku dari pertanian yang diperlukan. Sebaliknya jika terjadi kemunduran di sektor industri, maka sektor pertanian mengalami kesulitan untuk memperoleh barang-barang yang diperlukan. Walaupun seluruh sektor dalam perekonomian menurut para ahli saling ada keterkaitan satu sama lain, akan tetapi kuat atau lemahnya keterkaitan antar sektor sangat berbeda.

Pendapat Mellor tersebut juga didukung oleh Jhingan (1990), pembangunan berimbang membutuhkan keseimbangan antara berbagai sektor ekonomi. Harus ada keseimbangan yang tepat antara investasi di bidang pertanian dan bidang industri, karena kedua bidang ini bersifat saling melengkapi. Peningkatan output di bidang industri membutuhkan perluasan output di bidang pertanian. Jika pekerjaan di sektor industri meningkat, akan membawa peningkatan permintaan bahan-bahan makanan. Oleh karena itu penawaran bahan makanan harus ditingkatkan. Bersamaan dengan meluasnya sektor industri tersebut, penawaran bahan mentah juga harus ditingkatkan. Karena itu sektor pertanian harus berkembang bersama-sama dengan sektor industri.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Lewis dalam Jhingan (1990), di dalam program pembangunan, semua sektor ekonomi harus tumbuh secara serentak untuk menjaga keseimbangan yang tepat antara industri dan pertanian serta antara produksi untuk konsumsi dalam negeri dan produksi untuk ekspor.

Dari sisi lain Jhingan (1990) menyatakan, setiap investasi dapat mempunyai pengaruh keterkaitan ke depan maupun pengaruh keterkaitan ke belakang. Pengaruh kaitan ke depan mendorong investasi pada tahap produksi

berikutnya, dan pengaruh kaitan ke belakang mendorong investasi pada tahap produksi sebelumnya. Pembangunan harus bertujuan untuk menemukan proyek-proyek yang mempunyai kaitan total paling besar. Keterkaitan ke depan (*forward linkage*) diukur berdasarkan perbandingan antara nilai jual hasil industri diluar sektor industri yang bersangkutan dan seluruh nilai dari jumlah permintaan, dan dinyatakan dalam persentase. Keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) diukur berdasarkan perbandingan antara pembelian dari luar sektor yang bersangkutan dan jumlah nilai produksi yang dihasilkan dan dinyatakan dalam persentase. Keterkaitan ini memperlihatkan saling ketergantungan struktural dalam suatu ekonomi dan seberapa jauh pertumbuhan pada satu sektor dapat memberikan rangsangan terhadap pengembangan sektor lainnya.

Masalah Investasi

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 20/1994 yang mengizinkan/membolehkan investor asing memiliki saham hingga 95 persen, maka investasi yang masuk ke Indonesia umumnya dan khususnya Riau untuk kelapa sawit mengalami kenaikan yang pesat. Puncaknya terjadi pada tahun 1997. Tetapi dengan terjadinya krisis yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997 maka investasi untuk sektor perkebunan kelapa sawit mulai melemah. Padahal dalam lima tahun terakhir sektor ini mengalami *booming*.

Untuk menarik investor menanam modalnya di Riau maka sejak Juni 1999 melalui Badan Promosi dan Investasi Propinsi Riau diumumkan layanan baru berupa pengurusan investasi melalui Kedutaan Besar RI (KBRI) setempat,

sehingga calon investor tidak perlu lagi ke Jakarta. Dengan adanya kebijaksanaan ini maka investasi untuk membuka lahan kelapa sawit di Riau kembali sedikit bergairah. Investor yang banyak menanamkan modalnya di Indonesia adalah dari Malaysia, yang berpatungan dengan pengusaha lokal. Dengan “disanderanya” beberapa perusahaan kelompok Salim Grup di BPPN, pengusaha dari Malaysia lebih banyak lagi memiliki lahan sawit di Riau. Perusahaan yang paling berminat membeli kebun kelapa sawit eks milik Salim Grup adalah kumpulan *Ghutrie Berhad*. Hal ini dikhawatirkan dapat merugikan petani sawit lainnya, sebab sebagai *single biggest buyer* mereka dapat menekan harga TBS.

Apa yang telah diuraikan di atas memberikan bukti bahwa potensi pembangunan pabrik pengolah kelapa sawit (PKS) sangat berpotensi untuk dikembangkan di daerah Riau.

Kesimpulan

1. Untuk mewujudkan tujuan pengembangan ekonomi kerakyatan, terutama di sektor pertanian maka perlu dipersiapkan kebijakan strategis untuk memperbesar atau mempercepat pertumbuhan sektor pertanian, khususnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah pengembangan agribisnis yang terencana dengan baik dan terkait dengan pembangunan sektor ekonomi lainnya.
2. Prospek pembangunan agroindustri kelapa sawit di daerah Riau sangat cerah. Apabila diasumsikan jam kerja pabrik per hari 16 jam dan dalam satu bulan pabrik bekerja selama 25 hari, maka kekurangan kapasitas PKS

sebesar 2.557 ton per jam atau setara dengan 57 buah PKS dengan kapasitas 45 ton per jam.

Rekomendasi

1. Guna mengatasi distorsi harga antara petani plasma dan swadaya perlu penambahan PKS, terutama di wilayah perkebunan swadaya murni. Petani pada posisi yang lemah, sebab harga ditentukan sepihak oleh pembeli TBS (pasar monopsonistik).
2. Pembangunan PKS ini harus dirancang dalam bentuk agroesteit kelapa sawit. Konsep agroesteit kelapa sawit merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan inti dengan petani peserta dalam bentuk kepemilikan kebun dan PKS. Petani membeli paket melalui koperasi yang terdiri dari kebun kelapa sawit dan saham PKS. Rancangan model agroesteit kelapa sawit di pedesaan bertujuan untuk menjamin kepastian pengolahan TBS yang dihasilkan oleh petani peserta.
3. Untuk merangsang investor melakukan investasi yang berbasis pedesaan (PKS), maka harus ada kebijakan pemerintah daerah terhadap kegiatan investasi tersebut. Kebijakan itu antara lain; memperpendek rantai birokrasi perizinan; membebaskan PPN dalam jangka waktu tertentu; atau pengurangan pemotongan pajak penghasilan. Sehingga biaya produksi dapat ditekan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin. B., 2001. *Spektrum Kebijakan Pertanian Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Dinas Perkebunan Propinsi Riau., 2003, *Laporan Tahunan*, Dinas Perkebunan Propinsi Riau, Pekanbaru.

- Djojodipuro. M ., 1992, *Teori Lokasi*, LP-FE Universitas Indonesia, Jakarta.
- Jhingan. M.L., 1994. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Rajawali Pers, Jakarta.*
- Mellor, John W., 1984, Agriculture Development and Inter-Sectoral Transfer of Resources, dalam C.K Eicher dan J.M. Staatz, 1984, *Agriculture Development in the Third World*, John Hopkin University Press, Baltimore.
- Pemda Propinsi Riau., 2000, *Rencana Strategi Pembangunan Daerah Riau*, Kantor Pembangunan Masyarakat Desa, Pekanbaru.
- Sostroamidjojo dan Entang., 1975, *Ekonomi Pembangunan*, Armico, Bandung.
- Suhartiningsih. W., 2003, Membangun Agroindustri Berbasis Kelapa Sawit, dalam *Usahawan Indonesia* No 02/TH.XXXII Februari 2003, halaman 53-55, Lembaga Manajemen FE-UI, Jakarta.
- Syahza. A., 2002. Potensi Pembangunan Industri Hilir Kelapa Sawit di Daerah Riau, dalam *Usahawan Indonesia*, No. 04/TH XXXI April 2002, halaman 45-51, Lembaga Manajemen FE UI, Jakarta.
- Syahza. A., 2003a. Prospek Pembangunan Industri Minyak Goreng di Daerah Riau, dalam *Sosiohumaniora*, Vol 5 No 1, Maret 2003, halaman 68-77, Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Syahza. A., 2003b. Rancangan Model Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan Melalui Pembangunan Agroestat Kelapa Sawit di Daerah Riau, dalam *Jurnal Ekonomi*, Th. VIII/02/November/2003, halaman 194-205, PPD&I Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta.
- Syahza. A., 2004. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Melalui Pengembangan Industri Hilir Berbasis Kelapa Sawit di Daerah Riau*, Disertasi Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Tambunan. T.T.H., 2001. *Transformasi Ekonomi di Indonesia Teori dan Penemuan Empiris*, Salemba Empat, Jakarta.
- Kotler, Philip., 1997, *Manajemen Pemasaran*, Prenhallindo, Jakarta.